



PAPARKAN--Prof Martin Griffiths dari Flinders University, Australia menyampaikan paparannya dalam ICSP 2016 di UMY, kemarin.

YVESTA PUTU AYU/HARIAN BERNAS

Modernisasi China Munculkan Persoalan

JOGJA--Modernisasi yang terjadi di China tidak melulu berdampak positif. Banyak persoalan yang muncul karena perkembangan ekonomi negara tirai bambu tersebut.

"Perkembangan ekonomi di Cina selama dua dekade terakhir mendorong terjadinya urbanisasi sebanyak 60 persen. Namun urbanisasi tersebut menyebabkan tiga masalah besar pada China," ungkap Prof Martin Griffiths dari Flinders University, Australia, sebagai keynote speaker pada International Conference on Social Politics (ICSP) 2016 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), kemarin.

Menurut Martin, Gross Domestic Product (GDP) China sebenarnya lebih unggul daripada negara maju seperti Amerika Serikat (AS). Namun dari sisi ekonomi, pendapatan perkapita masyarakatnya lebih rendah.

Masyarakat China tidak bisa dipastikan mampu mempertahankan pertumbuhan ekonominya. Sebab produk buatan China selalu dijual lebih murah kepada pasar. "Apakah hal itu

tidak justru merugikan negara itu sendiri. Masalah kedua adalah aturan kepemilikan pribadi," tandasnya.

Martin menyebutkan, masalah lain yang muncul adalah terkait urbanisasi. Banyak masyarakat China yang berurbanisasi. Hal itu menimbulkan masalah property right (hak kepemilikan) antar penduduk kota dengan pemerintah. "Sehingga masalah kebijakan pembangunan akan timbul dalam persoalan urbanisasi," ujarnya.

Dengan maraknya urbanisasi di China, Martin mempertanyakan negara itu dapat bertahan menjadi negara yang superpower. Perkembangan China yang ingin menjadi negara superpower, yang dipertanyakan adalah apakah mereka menjadi negara superpower yang peaceful atau non-peaceful.

"Dapatkah mereka menciptakan kedamaian untuk masyarakatnya ataukah tidak," ujarnya.

Sementara Dr Muhammad Zaki bin Ahmad dari Universiti Utara Malaysia membahas tentang United Nation Conference

on the Law of the Sea (UNCLOS) III dan proses pembuatan keputusannya. UNCLOS III merupakan konferensi PBB yang membahas kesepakatan tentang hukum laut.

"UNCLOS ini juga merupakan kesepakatan yang dimulai sejak tahun 1968 dan baru berakhir pada 1982 karena menggunakan sistem konsensus dan bukan voting dengan suara terbanyak," jelasnya.

Guru Besar UMY, Prof Tulus Warsito menambahkan, tantangan ilmu sosial politik dalam perubahan dunia muncul karena perubahan masyarakat dan tantangan dalam perubahan ilmu pengetahuan. Dalam perubahan masyarakat, saat ini masyarakat sudah menjadi lebih terbuka, tidak terbatas, mengglobal, cepat berubah dan secara bersamaan, baru dan unik.

"Sedangkan dalam perubahan ilmu pengetahuan, kita tidak dapat terus menerus percaya terhadap suatu teori tertentu karena Teori itu dapat berubah sewaktu-waktu," imbuhnya.

(ptu)